



LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN **FORUM KONSULTASI PUBLIK**



20
25

**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN TAPIN**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI ii

KATA PENGANTAR iii

BAB I PENDAHULUAN 1

1. Latar Belakang 1

2. Tujuan dan Manfaat 1

3. Ruang Lingkup 2

BAB II METODOLOGI PELAKSANAAN FKP 3

1. Waktu dan Tempat Pelaksanaan..... 3

2. Penyelenggara dan Peserta FKP 3

3. Metode Pelaksanaan FKP 3

4. Susunan Acara FKP 3

BAB III HASIL PELAKSANAAN FKP 5

1. Identifikasi Masalah 5

2. Analisis 5

3. Rencana Aksi 6

BAB IV PENUTUP 11

LAMPIRAN I : Surat Undangan

LAMPIRAN II : Berita Acara

LAMPIRAN III : Daftar Hadir

LAMPIRAN IV : Dokumentasi Kegiatan

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga kegiatan Forum Konsultasi Publik (FKP) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapin dapat terlaksana dengan lancar dan laporan kegiatan ini dapat disusun dengan baik.

Forum Konsultasi Publik merupakan wadah penting dalam rangka memperkuat partisipasi masyarakat, mitra kerja, serta seluruh pemangku kepentingan dalam proses perencanaan dan pelaksanaan program di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana. Melalui forum ini, diharapkan dapat terbangun sinergi dan kesepahaman bersama dalam upaya mewujudkan keluarga yang berkualitas, sejahtera, dan berketahanan di Kabupaten Tapin.

Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh peserta FKP, baik dari unsur pemerintah daerah, lembaga masyarakat, dunia usaha, akademisi, maupun media yang telah memberikan masukan, saran, serta komitmen dalam mendukung keberhasilan program-program Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapin.

Semoga laporan ini dapat menjadi bahan evaluasi, referensi, dan tindak lanjut dalam penyusunan kebijakan dan program kerja di masa yang akan datang. Besar harapan kami, hasil dari forum ini dapat memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kualitas pelayanan dan pembangunan kependudukan serta keluarga berencana di Kabupaten Tapin.

Rantau, 07 November 2025


Kepala Dinas,
H. Fauziah, S. Sos, M.AP
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 196601071987032008

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Forum Konsultasi Publik (FKP) merupakan wadah partisipatif yang diselenggarakan untuk menjaring aspirasi, masukan, dan saran dari berbagai pemangku kepentingan dalam rangka penyusunan kebijakan dan program pembangunan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Kegiatan ini menjadi salah satu instrumen penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, partisipatif, dan akuntabel sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Di tingkat daerah, khususnya pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapin, pelaksanaan Forum Konsultasi Publik menjadi bagian penting dalam proses perencanaan program dan kegiatan yang berkaitan dengan pengendalian penduduk serta pembangunan keluarga. Melalui kegiatan ini, diharapkan terjadi dialog interaktif antara pemerintah daerah, perangkat daerah terkait, mitra kerja, organisasi masyarakat, akademisi, serta tokoh masyarakat untuk memperoleh berbagai pandangan dan rekomendasi yang konstruktif.

Penyelenggaraan FKP juga bertujuan untuk memastikan bahwa setiap kebijakan dan program yang disusun oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapin benar-benar berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat serta selaras dengan arah kebijakan nasional dan daerah. Selain itu, kegiatan ini menjadi sarana evaluasi terhadap pelaksanaan program sebelumnya, sekaligus memperkuat sinergi lintas sektor dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana di Kabupaten Tapin.

Dengan demikian, Forum Konsultasi Publik diharapkan dapat menjadi momentum penting dalam memperkuat peran serta masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan, meningkatkan kualitas kebijakan publik, serta mewujudkan visi pembangunan daerah yang berkelanjutan dan berkeadilan.

2. Tujuan dan Manfaat

Tujuan pelaksanaan Forum Konsultasi Publik (FKP) di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapin adalah untuk menyediakan ruang dialog terbuka antara pemerintah daerah dengan masyarakat serta para pemangku kepentingan dalam rangka penyusunan program dan kebijakan yang lebih tepat sasaran. Melalui kegiatan ini, diharapkan dapat dihimpun berbagai aspirasi, masukan, serta saran konstruktif terkait isu-isu strategis di Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapin. Selain itu, FKP juga bertujuan untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas proses perencanaan pembangunan, memastikan adanya keterlibatan publik dan pemangku kepentingan terkait dalam pengambilan

keputusan, serta mendorong kolaborasi lintas sektor guna meningkatkan efektivitas dan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Adapun manfaat dilaksanakannya kegiatan Forum Konsultasi Publik terkait untuk meningkatkan pelayanan publik yaitu :

- a. Menjadi sarana komunikasi dan koordinasi antara pemerintah daerah dengan mitra kerja serta pemangku kepentingan terkait.
- b. Menggali masukan dan aspirasi dari berbagai pemangku kepentingan sebagai dasar penyusunan kebijakan dan program kerja.
- c. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan evaluasi program pembangunan daerah.
- d. Mendorong terwujudnya kebijakan yang lebih inklusif, transparan, dan akuntabel.
- e. Memperkuat sinergi dan kolaborasi antara pemerintah daerah, mitra kerja, serta organisasi masyarakat.
- f. Menjadi sarana evaluasi terhadap capaian program dan identifikasi permasalahan yang perlu ditindaklanjuti dalam perencanaan berikutnya.

3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup kegiatan Forum Konsultasi Publik (FKP) di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapin mencakup seluruh tahapan proses perencanaan dan evaluasi kebijakan serta program pembangunan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana. Kegiatan ini melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, baik dari instansi pemerintah, mitra kerja, organisasi masyarakat, akademisi, maupun tokoh masyarakat.

Secara umum, ruang lingkup FKP meliputi:

- a. Penyampaian informasi dan paparan program Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mengenai arah kebijakan, capaian kinerja, serta rencana kegiatan yang akan dilaksanakan.
- b. Diskusi dan konsultasi publik untuk menghimpun masukan, saran, dan rekomendasi dari peserta terhadap rancangan kebijakan, program, atau kegiatan prioritas.
- c. Identifikasi permasalahan dan kebutuhan masyarakat di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana sebagai dasar perencanaan yang lebih tepat sasaran.
- d. Perumusan hasil dan rekomendasi yang akan menjadi bahan pertimbangan dalam penyempurnaan dokumen perencanaan dan kebijakan.
- e. Peningkatan koordinasi dan sinergi antarinstansi serta dengan mitra kerja dalam pelaksanaan program di tingkat kabupaten.

BAB II
METODOLOGI PELAKSANAAN FKP

1. Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Forum Konsultasi Publik Terkait Meningkatkan Pelayanan Pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapin dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 05 November tahun 2025 bertempat di Aula Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapin.

2. Penyelenggara dan Peserta FKP

Forum Konsultasi Publik Terkait Meningkatkan Pelayanan Publik Pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapin ini diselenggarakan oleh Bidang Keluarga Berencana; Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan; Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga serta Bidang Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapin yang diikuti oleh TP-PKK Kabupaten Tapin, Kementerian Agama Kabupaten Tapin, Dinas Kesehatan Kabupaten Tapin, Bagian Organisasi Setda Kabupaten Tapin, RSUD Datu Sanggul Kabupaten Tapin, Kecamatan Tapin Utara, Puskesmas Se-Kabupaten Tapin, KUA Se-Kabupaten Tapin, Perwakilan Tempat Praktik Mandiri Bidan, Perwakilan Klinik Kesehatan Kabupaten Tapin, Ikatan Penyuluh Keluarga Berencana (IPeKB), Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Kabupaten Tapin, Tapin TV Kabupaten Tapin, dan Kader TPK Desa Perintis Kecamatan Tapin Utara, yang berjumlah total 75 orang.

3. Metode Pelaksanaan FKP

Metode pelaksanaan Forum Konsultasi Publik terkait Meningkatkan Pelayanan Pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapin adalah dengan Rapat Koordinasi tatap muka, diskusi, dan tanya jawab kepada seluruh peserta.

4. Susunan Acara FKP

SUSUNAN ACARA
FORUM KOMUNIKASI PUBLIK
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

HARI/TANGGAL	WAKTU	KEGIATAN	KETERANGAN
Rabu, 5 November 2025	09.00 s/d 09.30 WITA	Pembukaan - Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia	

		<ul style="list-style-type: none"> - Mars Keluarga Berencana - Doa - Sambutan dan membuka Acara - Foto Bersama 	
	09.30 s/d 12.30 Wita	Materi <ol style="list-style-type: none"> 1. Bidang Keluarga Berencana 2. Bidang Ketahanan Kesehjateraan Keluarga 3. Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan 	
	12.30 s/d 13.00 wita	Diskusi dan tanya jawab	
	13.00 s/d 13.15 Wita	Penandatanganan Berita Acara	
	13.15 s/d 13.30 Wita	Penutup	

BAB III

HASIL PELAKSANAAN FKP

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan hasil pelaksanaan Forum Konsultasi Publik (FKP) di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapin, terdapat beberapa permasalahan yang teridentifikasi dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan. Permasalahan tersebut meliputi aspek koordinasi antarinstansi, ketersediaan data dan informasi, serta pemahaman masyarakat terhadap layanan yang disediakan.

Masih ditemukan kendala dalam penyebarluasan informasi program dan layanan keluarga berencana, sehingga sebagian masyarakat belum sepenuhnya memahami prosedur dan manfaat yang dapat diperoleh. Selain itu, keterbatasan sarana dan prasarana pendukung, termasuk sistem informasi yang belum optimal, juga menjadi hambatan dalam pelaksanaan pelayanan yang cepat dan tepat.

Di sisi lain, tingkat partisipasi masyarakat dan mitra kerja dalam kegiatan konsultasi dan evaluasi program masih perlu ditingkatkan agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Diperlukan pula peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan data dan pemanfaatan teknologi informasi, agar pelayanan yang diberikan dapat berjalan lebih efisien, transparan, dan akuntabel.

Dengan teridentifikasinya permasalahan tersebut, diharapkan hasil Forum Konsultasi Publik dapat menjadi dasar bagi penyusunan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan program dan memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, masyarakat, mitra kerja, dan pemangku kepentingan lainnya.

2. Analisis

Adapun analisis terkait hasil pelaksanaan FKP di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapin yaitu :

1. Masih terdapat kendala komunikasi antara pemerintah daerah, mitra kerja, dan masyarakat dalam penyampaian informasi program dan layanan.
2. Pemahaman masyarakat terhadap program dan layanan keluarga berencana masih rendah, sehingga diperlukan peningkatan kegiatan sosialisasi dan edukasi publik.
3. Partisipasi masyarakat dan mitra kerja dalam forum konsultatif masih perlu diperluas, agar kebijakan yang dihasilkan lebih inklusif dan sesuai dengan kebutuhan riil di lapangan.

4. Forum Konsultasi Publik telah menjadi wadah efektif untuk menyampaikan aspirasi dan masukan, sehingga dapat memperkuat transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah.
5. Hasil FKP dapat dijadikan bahan evaluasi dan dasar penyusunan rencana tindak lanjut, guna meningkatkan kualitas pelayanan publik dan efektivitas pelaksanaan program.
6. Pelaksanaan FKP berdampak positif terhadap peningkatan kolaborasi lintas sektor, serta memperkuat komitmen bersama dalam memberikan pelayanan publik yang cepat, tepat, dan transparan.

3. Rencana Aksi

No.	Rekomendasi dan Target Penyelesaian	Tindak Lanjut	Penjelasan
1.	Untuk mengurangi angka stunting di Kabupaten Tapin, salah satu upaya yang perlu dilakukan adalah mencegah perkawinan usia dini, idealnya tidak di bawah 18 tahun. Saat ini masih banyak ditemui ibu hamil berusia 15–16 tahun yang sering mengaku usianya lebih tua dari sebenarnya. Padahal, bidan memerlukan data usia yang akurat untuk memantau kesehatan ibu dan janin. Sebagian besar pernikahan tersebut dilakukan di bawah tangan, dan banyak calon ibu yang belum memiliki pengetahuan tentang kesehatan kehamilan. Berdasarkan penelitian, hampir 50% ibu hamil memiliki kadar hemoglobin (HB) rendah. Oleh karena itu, edukasi tentang gizi, usia ideal pernikahan, dan kesehatan ibu hamil sebaiknya diberikan tidak hanya oleh tenaga kesehatan, tetapi juga oleh Kantor Urusan Agama (KUA) pada saat berhadapan dengan Calon Pengantin. HB sangat penting bagi pertumbuhan janin dan proses persalinan. Ibu hamil diharapkan mengonsumsi makanan bergizi seimbang, bukan sekadar untuk merasa kenyang.	2026	<ul style="list-style-type: none"> • Diperlukan pendekatan keluarga melalui program Bina Keluarga Remaja (BKR) dengan edukasi Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) mengenai usia ideal pernikahan, konsumsi tablet tambah darah, dan kesehatan reproduksi. Tantangannya adalah bagaimana melibatkan mitra kerja untuk mendorong remaja menunda kehamilan. Upaya ini akan terus didiskusikan guna menemukan metode yang lebih efektif berdasarkan hasil konseling dengan klien. Namun, kendala yang dihadapi adalah banyak remaja telah terpapar informasi negatif dari media sosial sehingga sulit diarahkan dan diberikan edukasi. Berdasarkan hasil audit stunting, perubahan perilaku menjadi langkah terobosan utama dalam upaya penanganannya. • Kementerian Agama (Kemenag), Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB), serta Dinas Kesehatan (Dinkes) telah memiliki nota kesepahaman / <i>Memorandum of Understanding</i> (MoU) dan berkolaborasi dalam bidang kesehatan serta pengendalian penduduk. Di Kemenag, terdapat dua program nasional, yaitu bimbingan remaja usia sekolah dan bimbingan calon pengantin. Sejalan dengan Undang-Undang

			<p>Perkawinan yang mengatur batas usia pernikahan, Kemenag telah bekerja sama dengan Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) dalam kegiatan penasihatan perkawinan. Kemenag berfokus pada aspek hukum pernikahan, sedangkan aspek kesehatan menjadi tanggung jawab Dinas Kesehatan.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kolaborasi antara Dinas Kesehatan (Dinkes) dan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) telah berjalan dengan baik. Berdasarkan data dari seksi pelayanan dan gizi, angka kematian ibu, kematian bayi, dan stunting menunjukkan tren penurunan. Pencatatan dan pelaporan pelayanan KB yang dilakukan puskesmas melalui Dinkes juga menunjukkan korelasi positif, yaitu menurunnya angka kelahiran seiring meningkatnya penggunaan alat kontrasepsi. Diharapkan kolaborasi antar-SKPD ini dapat terus berlanjut dan semakin diperkuat di masa mendatang.
2.	<p>Terkait alat kontrasepsi, masyarakat sering menanyakan apakah Metode Operasi Pria (MOP) bersifat permanen atau sementara, serta apa saja risikonya. Berdasarkan salah satu contoh kasus, seorang pria yang telah menikah dan memiliki banyak anak memutuskan menjalani MOP. Namun, setelah beberapa waktu, rumah tangganya berakhir dengan perceraian. Sehingga menjadi pertanyaan apakah MOP merupakan pilihan utama atau justru menjadi pilihan terakhir dalam program keluarga berencana.</p>		<ul style="list-style-type: none"> • Metode Operasi Pria (MOP) merupakan kontrasepsi yang bersifat permanen setelah dipilih. Sebelum tindakan dilakukan, pasangan wajib menjalani konseling dan pemeriksaan kesehatan oleh dokter bedah. Terdapat beberapa persyaratan, antara lain usia peserta minimal 35 tahun, memiliki keluarga yang harmonis, serta jumlah anak dianggap sudah cukup. Semua ketentuan tersebut akan dijelaskan terlebih dahulu oleh Penyuluh Keluarga Berencana (PKB).
3.	<p>Terkait pengendalian penduduk, dapatkah data capaian program KB di setiap daerah dapat ditampilkan, sehingga data tersebut dapat</p>		<ul style="list-style-type: none"> • Semua data terkait kegiatan dan pelayanan hingga tingkat kabupaten dan kecamatan tersedia di aplikasi SIGA https://newsiga-siga.bkkbn.go.id. Untuk data yang

	digunakan oleh Kemenag saat melakukan sosialisasi di lapangan untuk menunjukkan daerah dengan tingkat penggunaan KB yang tinggi maupun daerah yang masih rendah.		lebih spesifik hingga tingkat desa, permintaan dapat diajukan kepada PKB atau PLKB setempat sebagai admin yang memegang data lapangan. Sementara itu, data rinci seperti by name by address dapat diminta langsung ke Bidang Dalduk DPPKB.
4.	Untuk kegiatan tahun depan, materi dapat difokuskan pada pembahasan yang lebih spesifik terkait permasalahan yang perlu dikaji bersama stakeholder dan pihak terkait, seperti perluasan distribusi alat kontrasepsi (alokon) serta teknis pelaksanaannya.		<ul style="list-style-type: none"> • Pada agenda FKP perdana DPPKB Kabupaten Tapin, yang disampaikan hanya gambaran umum kegiatan dan tugas DPPKB. Pembahasan lebih spesifik terkait isu permasalahan dan kerja sama akan dilakukan pada tahun depan. Diharapkan ke depan, seluruh SKPD dapat terus berkolaborasi dan bekerja sama dengan baik. • Adapun teknis dan standar pelayanan KB Bergerak terdiri dari (rincian terlampir) : <ol style="list-style-type: none"> 1. Persyaratan Pelayanan 2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur 3. Jangka Waktu Penyelesaian 4. Jam Pelayanan 5. Biaya/tarif 6. Produk Pelayanan 7. Penanganan, Pengaduan Saran dan Masukan 8. Dasar Hukum 9. Saran dan Prasarana 10. Kompetensi Pelaksana 11. Pengawasan Internal 12. Jumlah Pelaksana 13. Jaminan Pelayanan 14. Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan 15. Evaluasi Kinerja Pelaksana



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Jalan Pembangunan Nomor 7 Kelurahan Rantau Kiwa Kode Pos 71111 Pos-el :
bppkb.tapin@gmail.com

STANDAR PELAYANAN KB BERGERAK

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1. Petugas pelayanan KB keliling menerima Surat Tugas dari Kepala DPPKB Kab. Tapin2. Dinas DPPKB Kab. Tapin membuat surat permintaan bantuan tenaga kesehatan (dokter/bidan) ke faskes untuk pelayanan KB Bergerak di wilayah setempat3. Mengoordinasikan dan melapor kepada pemerintah setempat (Kepala Desa/Kelurahan/Kepala Dusun) bahwa akan melakukan Pelayanan KB bergerak
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Calon Akseptor datang mendaftar ke Tempat Pelayanan KB Bergerak dengan membawa fotocopy KTP/KK dan mendapat K/I/KB serta hasil data calon2. Bidan memberikan konseling kepada calon Akseptor3. Apabila bidan menemukan kontra indikasi pelayanan KB yang dikehendaki calon Akseptor pada saat penapisan maka perlu konseling pemilihan metode lain yang sesuai setelah calon akseptor KB menyetujui untuk menggunakan salah satu metode kontrasepsi untuk pelayanan suntik, pil, implant, IUD dan kondom maka perlu persetujuan secara tertulis dengan menandatangani formulir informed consent
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	<ol style="list-style-type: none">1. Untuk Pelayanan KB Suntik membutuhkan pelayanan selama 15 menit2. Untuk pelayanan KB Pil membutuhkan pelayanan selama 10 menit3. Untuk Pelayanan KB Implant membutuhkan pelayanan selama 15 menit4. Untuk Pelayanan KB IUD membutuhkan pelayanan selama 20 menit5. Untuk Pelayanan KB Kondom membutuhkan pelayanan KB selama 10 menit6. Untuk Pelayanan KB Cabut Implant membutuhkan waktu selama 30 menit
4.	Jam Pelayanan	Setiap ada jadwal : 09.00 WITA - Selesai
5.	Biaya/tarif	Tidak dipungut biaya (gratis)
6.	Produk Pelayanan	Pelayanan KB IUD, Implant, Pencabutan Implant, Pil, Suntik, dan Kondom
7.	Penanganan, Pengaduan Saran dan Masukan	Menyampaikan pengaduan melalui : -Kotak Saran, Telepon 0821 5709 1400 -Email : bppkb.tapin@gmail.com -Instagram : @banggakencana_tapin @mojang_bastari_tapin -Website : dppkb.profile.tapinkab.go.id

PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)

8.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU NO. 10/1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Kesejahteraan Keluarga 2. UU No. 52/2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga
9.	Saran dan Prasarana	<ol style="list-style-type: none"> 1. MUYAN KB (Mobil Unit Pelayanan Keluarga Berencana) 2. Mobil penjemputan Akseptor 3. ATK, Meja, Kursi, Alat IUD Kit, Alat Implant Removal Kit, (alokon), BAKHP
10.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kualifikasi Pendidikan Dokter, Bidan, S1 dan sederajat SMA 2. Menguasai Komputer 3. Menguasai Tata Bahasa yang Baik
11.	Pengawasan Internal	Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang
12.	Jumlah Pelaksana	Tim Kabupaten dan Tim Kecamatan berjumlah 10 orang
13.	Jaminan Pelayanan	DPPKB Kabupaten Tapin menjamin seluruh pelayanan yang sudah diberikan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP)
14.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Tanda Tangan Elektornik
15.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<p>Kinerja Pelaksana Pelayanan terukur melalui Survey Kepuasan (SKM) secara online di Link :</p> <p>https://forms.gle/DTvEbaryXkWzX4SY6</p>

BAB IV

PENUTUP

Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik (FKP) di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapin berjalan dengan baik dan lancar. Kegiatan ini telah menjadi wadah strategis bagi pemerintah daerah bersama pemangku kepentingan untuk bertukar pikiran, menyampaikan aspirasi, serta memberikan masukan konstruktif dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik, khususnya di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

Melalui forum ini, berbagai permasalahan dan tantangan dalam pelaksanaan program dapat teridentifikasi dengan baik, sehingga menjadi dasar dalam penyusunan langkah-langkah perbaikan yang lebih terarah dan tepat sasaran. Selain itu, kegiatan FKP juga mendorong terwujudnya komunikasi yang lebih terbuka, sinergi lintas sektor, dan partisipasi aktif masyarakat dalam proses perencanaan serta evaluasi kebijakan publik.

Diharapkan hasil dari pelaksanaan Forum Konsultasi Publik ini dapat memberikan manfaat nyata dalam peningkatan kinerja pelayanan publik di Kabupaten Tapin, serta menjadi pijakan bagi pengambilan kebijakan yang lebih efektif, transparan, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

Dengan demikian, kegiatan ini diharapkan tidak hanya menjadi agenda rutin tahunan, tetapi juga menjadi momentum untuk memperkuat komitmen bersama dalam mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas, responsif, dan berkelanjutan.

Rantau, 07 November 2025

Kepala Dinas,


H. Fatizlah, S. Sos, M.AP
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 196601071987032008

Lampiran 1. Surat Undangan



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Datu Nuraya RT. 01 Kelurahan Rangda Malingkung, Kawasan Rantau Baru
RANTAU Kode Pos 71114

Rantau, 03 November 2025

Nomor : 400.13.44.1/ 882 /DPPKB/2025
Lampiran : 1 (satu) halaman
Perihal : **Undangan Forum Konsultasi
Publik (FKP)**

Kepada Yth.
(Daftar Undangan Terlampir)
di -
Tempat

Sehubungan akan dilaksanakannya Kegiatan Forum Konsultasi Publik (FKP) Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Tapin guna Meningkatkan Kualitas Pelayanan, dengan ini kami mengundang Bapak/Ibu untuk dapat berhadir pada kegiatan tersebut yang akan dilaksanakan pada :

Hari : Rabu
Tanggal : 05 November 2025
Pukul : 09.00 Wita s.d Selesai
Tempat : Aula DPPKB Kabupaten Tapin

Demikian undangan ini disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

a.n. Bupati Tapin
Pj.Sekretaris Daerah,



Unda Absori, S.H., M.H
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 197007222005011013

Tembusan Yth :
1. Bupati Tapin
2. Arsip

Lampiran Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Tapin

Nomor : 400.13.44.1/882/DPPKB/2025

Tanggal : 03 November 2025

DAFTAR UNDANGAN

No	SKPD / Mitra / Instansi	Jumlah / Peserta
1.	TP-PKK Kabupaten Tapin	1 (satu) Orang
2.	Kementerian Agama Kabupaten Tapin	1 (satu) Orang
3.	Dinas Kesehatan Kabupaten Tapin	1 (satu) Orang
4.	Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Tapin	1 (satu) Orang
5.	RSUD Datu Sanggul Kab. Tapin	1 (satu) Orang
6.	Rumah Sakit Umum Handayati	1 (satu) Orang
7.	Camat Tapin Utara	1 (satu) Orang
8.	Kepala Puskesmas Tapin Utara	1 (satu) Orang
9.	Kepala Puskesmas Bakarangan	1 (satu) Orang
10.	Kepala Puskesmas Tambaruntung	1 (satu) Orang
11.	Kepala Puskesmas Baringin	1 (satu) Orang
12.	Kepala Puskesmas Margasari	1 (satu) Orang
13.	Kepala Puskesmas Pandahan	1 (satu) Orang
14.	Kepala Puskesmas Binuang	1 (satu) Orang
15.	Kepala Puskesmas Tambarangan	1 (satu) Orang
16.	Kepala Puskesmas Banua Padang	1 (satu) Orang
17.	Kepala Puskesmas Lokpaikat	1 (satu) Orang
18.	Kepala Puskesmas Hatungun	1 (satu) Orang
19.	Kepala Puskesmas Piani	1 (satu) Orang
20.	Kepala Puskesmas Salam Babaris	1 (satu) Orang
21.	Kepala KUA Tapin Tengah	1 (satu) Orang
22.	Kepala KUA Tapin Tapin Utara	1 (satu) Orang
23.	Kepala KUA Tapin Candi Laras Selatan	1 (satu) Orang
24.	Kepala KUA Tapin Selatan	1 (satu) Orang
25.	Kepala KUA Binuang	1 (satu) Orang
26.	Kepala KUA Candi Laras Utara	1 (satu) Orang
27.	Kepala KUA Lokpaikat	1 (satu) Orang
28.	Kepala KUA Bungur	1 (satu) Orang
29.	Kepala KUA Bakarangan	1 (satu) Orang
30.	Kepala KUA Piani	1 (satu) Orang
31.	Kepala KUA Salam Babaris	1 (satu) Orang
32.	Kepala KUA Hatungun	1 (satu) Orang
33.	Politeknik Islam Syekh Salman Al-Farisi	1 (satu) Orang
34.	TPMB Sri Endang Darmawati	1 (satu) Orang
35.	TPMB Hj. Barlian	1 (satu) Orang

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik

36.	TPMB Hj. Istiharah	1 (satu) Orang
37.	TPMB Hj. Mistern	1 (satu) Orang
38.	Klinik Sanka Satyawada Polres Tapin	1 (satu) Orang
39.	Klinik Kesehatan 06.09.20 Kodim 1010 Tapin	1 (satu) Orang
40.	Klinik Pratama Hasnur Citra Terpadu	1 (satu) Orang
41.	Ketua IPeKB Tapin	1 (satu) Orang
42.	Ketua Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Tapin	1 (satu) Orang
43.	Tapin TV	1 (satu) Orang
44.	Kader TPK Desa Printis Kecamatan Tapin Utara	3 (Tiga) Orang

Lampiran 2. Berita Acara



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Jalan Pembangunan Nomor. 7 Kelurahan Rantau Kiwa Kode Pos 71111
Pos-el bppkb.tapin@gmail.com

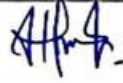
BERITA ACARA HASIL FORUM KONSULTASI PUBLIK (FKP) UNTUK
MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PADA DINAS PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN TAPIN

Pada hari ini Rabu, 05 November 2025 telah dilaksanakan Forum Konsultasi Publik untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pada Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapin. Pimpinan Unit Penyelenggara Pelayanan dapat menerima identifikasi masalah, usulan rekomendasi, jangka waktu dan berkomitmen menindaklanjuti rekomendasi perbaikan tersebut sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan.

Masyarakat dan Stakeholder yang hadir akan melakukan pemantauan dan mengawasi progres tindak lanjut perbaikan yang dilakukan oleh unit Penyelenggara Pelayanan sesuai usulan rekomendasi dan jangka waktu penyelesaian yang telah disepakati bersama. Demikian berita acara ini dibuat sebagai bahan masukan,

Tapin, 05 November 2025

NO	NAMA	PERWAKILAN	TANDA TANGAN
1.	Hj. Fauziah	DPPKB	
2.	Sri Marlina	Dokter	
3.	Hj Istikomah	IBI	
4.	Ardi S	RSUD-PS	

5	Ratna Sapitri	Politeknik Islam SSA Rantau	
6	Hj Maniyah	PLM	
7	Munadyah Effendy	kemenag	
8	Hj. Mistern	PRMB	
9	Eka purwati	Polres Tapin	
10	Hj. Mastika Murni	TPPK Kab	
11	Yusuf Sutiful	BAGOR	

Kepala DPKB Kab. Tapin

 Hj. Fauziah S. Sos, M.AP
 Pembina Utama Muda / IVc
 NIP. 196601071987032008



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Jalan Pembangunan Nomor. 7 Kelurahan Rantau Kiwa Kode Pos 71111
Pos-el bppkb.tapin@gmail.com

**LAMPIRAN BERITA ACARA HASIL FORUM KONSULTASI PUBLIK (FKP) PADA
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN
TAPIN**

Berdasarkan hasil diskusi dan keputusan bersama menyatakan sebagai berikut :

No.	Identifikasi Masalah	Usulan Rekomendasi Perbaikan	Jangka Waktu Penyelesaian
1.	Untuk mengurangi angka stunting di Kabupaten Tapin, salah satu upaya yang perlu dilakukan adalah mencegah perkawinan usia dini, idealnya tidak di bawah 18 tahun. Saat ini masih banyak ditemui ibu hamil berusia 15-16 tahun yang sering mengaku usianya lebih tua dari sebenarnya. Padahal, bidan memerlukan data usia yang akurat untuk memantau kesehatan ibu dan janin. Sebagian besar pernikahan tersebut dilakukan di bawah tangan, dan banyak calon ibu yang belum memiliki pengetahuan tentang kesehatan kehamilan. Berdasarkan penelitian, hampir 50% ibu hamil memiliki kadar hemoglobin (HB) rendah. Oleh karena itu, edukasi tentang gizi, usia ideal pernikahan, dan kesehatan ibu hamil sebaiknya diberikan tidak hanya oleh tenaga kesehatan, tetapi juga oleh Kantor Urusan Agama (KUA) pada saat berhadapan dengan Calon Pengantin. HB sangat penting bagi pertumbuhan janin dan proses persalinan. Ibu hamil diharapkan mengonsumsi makanan bergizi seimbang, bukan sekadar untuk merasa kenyang.	<ul style="list-style-type: none">Diperlukan pendekatan keluarga melalui program Bina Keluarga Remaja (BKR) dengan edukasi Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) mengenai usia ideal pernikahan, konsumsi tablet tambah darah, dan kesehatan reproduksi. Tantangannya adalah bagaimana melibatkan mitra kerja untuk mendorong remaja menunda kehamilan. Upaya ini akan terus didiskusikan guna menemukan metode yang lebih efektif berdasarkan hasil konseling dengan klien. Namun, kendala yang dihadapi adalah banyak remaja telah terpapar informasi negatif dari media sosial sehingga sulit diarahkan dan diberikan edukasi. Berdasarkan hasil audit stunting, perubahan perilaku menjadi langkah terobosan utama dalam upaya penanganannya.Kementerian Agama (Kemenag), Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB), serta Dinas Kesehatan (Dinkes)	1 Tahun

		<p>telah memiliki nota kesepahaman / <i>Memorandum of Understanding</i> (MoU) dan berkolaborasi dalam bidang kesehatan serta pengendalian penduduk. Di Kemenag, terdapat dua program nasional, yaitu bimbingan remaja usia sekolah dan bimbingan calon pengantin. Sejalan dengan Undang-Undang Perkawinan yang mengatur batas usia pernikahan, Kemenag telah bekerja sama dengan Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) dalam kegiatan penasihatan perkawinan. Kemenag berfokus pada aspek hukum pernikahan, sedangkan aspek kesehatan menjadi tanggung jawab Dinas Kesehatan.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kolaborasi antara Dinas Kesehatan (Dinkes) dan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) telah berjalan dengan baik. Berdasarkan data dari seksi pelayanan dan gizi, angka kematian ibu, kematian bayi, dan stunting menunjukkan tren penurunan. Pencatatan dan pelaporan pelayanan KB yang dilakukan puskesmas melalui Dinkes juga menunjukkan korelasi positif, yaitu menurunnya angka kelahiran seiring meningkatnya penggunaan alat kontrasepsi. Diharapkan kolaborasi antar-SKPD ini dapat terus berlanjut dan 	
--	--	--	--

		semakin diperkuat di masa mendatang.	
2.	Terkait alat kontrasepsi, masyarakat sering menanyakan apakah Metode Operasi Pria (MOP) bersifat permanen atau sementara, serta apa saja risikonya. Berdasarkan salah satu contoh kasus, seorang pria yang telah menikah dan memiliki banyak anak memutuskan menjalani MOP. Namun, setelah beberapa waktu, rumah tangganya berakhir dengan perceraian. Sehingga menjadi pertanyaan apakah MOP merupakan pilihan utama atau justru menjadi pilihan terakhir dalam program keluarga berencana.	<ul style="list-style-type: none"> Metode Operasi Pria (MOP) merupakan kontrasepsi yang bersifat permanen setelah dipilih. Sebelum tindakan dilakukan, pasangan wajib menjalani konseling dan pemeriksaan kesehatan oleh dokter bedah. Terdapat beberapa persyaratan, antara lain usia peserta minimal 35 tahun, memiliki keluarga yang harmonis, serta jumlah anak dianggap sudah cukup. Semua ketentuan tersebut akan dijelaskan terlebih dahulu oleh Penyuluh Keluarga Berencana (PKB). 	1 Tahun
3.	Terkait pengendalian penduduk, dapatkah data capaian program KB di setiap daerah dapat ditampilkan, sehingga data tersebut dapat digunakan oleh Kemenag saat melakukan sosialisasi di lapangan untuk menunjukkan daerah dengan tingkat penggunaan KB yang tinggi maupun daerah yang masih rendah.	<ul style="list-style-type: none"> Semua data terkait kegiatan dan pelayanan hingga tingkat kabupaten dan kecamatan tersedia di aplikasi SIGA https://newsiga-siga.bkkbn.go.id. Untuk data yang lebih spesifik hingga tingkat desa, permintaan dapat diajukan kepada PKB atau PLKB setempat sebagai admin yang memegang data lapangan. Sementara itu, data rinci seperti by name by address dapat diminta langsung ke Bidang Dalduk DPPKB. 	6 Bulan
4.	Untuk kegiatan tahun depan, materi dapat difokuskan pada pembahasan yang lebih spesifik terkait permasalahan yang perlu dikaji bersama stakeholder dan pihak terkait, seperti perluasan distribusi alat kontrasepsi (alokon) serta teknis pelaksanaannya.	<ul style="list-style-type: none"> Pada agenda FKP perdana DPPKB Kabupaten Tapin, yang disampaikan hanya gambaran umum kegiatan dan tugas DPPKB. Pembahasan lebih spesifik terkait isu permasalahan dan kerja sama akan dilakukan pada tahun depan. Diharapkan ke 	1 Tahun

		<p>depan, seluruh SKPD dapat terus berkolaborasi dan bekerja sama dengan baik.</p>	
--	--	--	--



Lampiran 3. Daftar Hadir

DAFTAR HADIR RAPAT

KEGIATAN
HARI, TANGGAL

: Undangan Forum Konsultasi Publik (FKP)
: Rabu, 05 November 2025

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	JABATAN	TANDA TANGAN
1	P. PAKIRUDDIN	L	Katun Tapin Tengah	1. [Signature]
2	Munggal Effendi Alti	L	Kasi Bins Klaten	2. [Signature]
3	Sandy	L	Wartawan	3. [Signature]
4	Nurbatiyah S.	P	TPMB Sri Endang D.	4. [Signature]
5	H. Mursidi	L	KA. KUA Binuang	5. [Signature]
6	Nurhayani	P	PkM MGR (Sidiqi)	6. [Signature]
7	Ahmad Muhajir Ali	L	(KUA) Salam Babaris	7. [Signature]
8	Nur Wido Rahma Sari	P	Pkm. Piani (Bidan)	8. [Signature]
9	Gri Marlenni	P	Stk KKG CDiker	9. [Signature]
10	Ecc puruari	P	Ican dokter pake tapin	10. [Signature]
11	Ritna Sapitri	P	Bendahara poktet	11. [Signature]
12	Normaganti	P	Pkan Tamboraangan	12. [Signature]
13	Hj Istikomah	P	Ketua IBI	13. [Signature]
14	Endang Listiawati	P	Pkan Salam Babarisi	14. [Signature]
15	Toio Adi Saputra	L	Pem Lokraitat	15. [Signature]
16	Ardi SK	L	Kabag fu	16. [Signature]
17	Yulis Istipah	P	af Ar-	17. [Signature]
18	Dewi Meika	P	Adt	18. [Signature]
19	Rayhan	P	pkm Pandahan	19. [Signature]
20	RESNI Shanti	P	TPK PERINTIS RAYA	20. [Signature]
21	NILAWATI	P	TPK PERINTIS RAYA	21. [Signature]
22	Nislawati S.S.I.	P	Pkm. Tamborutung.	22. [Signature]
23	Hj Indrayani	P	Pkm. Bakarangan	23. [Signature]
24	Nen Nurma	P	Pkm. Baranari	24. [Signature]
25	Muziqi Ramadnan	L	KUA Tapin Utara	25. [Signature]
26	Yenni Jayanti	P	Pkm. Hatungun	26. [Signature]
27	Nozaruddin	L	ICUN Bakaranga	27. [Signature]
28	Retro Anggrany. M.	P	PMB Hj. Mustem	28. [Signature]

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	JABATAN	TANDA TANGAN
29	Zairul Helmi	L	Ka KUA Hatungun	29.....
30	Noor Sapin	P	TPK p. raya	30.....
31	Hj. Manyas	P	flm. B. padang	31.....
32	Firmansyah.	L	LpPL TAPIN TR.	32.....
33	AMAD RIZAL	L	KA KUA AMANI	33.....
34	Apdalam	L	ka KUA CUN	34.....
35	Syamsir Nur Alam	L	Ka. KUA Lokpalat	35.....
36	Dewi Indrawati	P	TPMB Hj. Ishtarrah.	36.....
37	IBRU	L	WTW	37.....
38	Zanah rer	L	KUN CLS	38.....
39	Hj. Rizky. M	P	Bidan PKM Bng	39.....
40	Fathur Rahman		JCUA TAPSEL	40.....
41	Sahmuged Rahmon	L	Kepala KUN Bng	41.....
42	Dina Nurliani	P	Jf. Penata KEB	42.....
43	Nova Yusuita P.	P	staf	43.....
44	AMAD FATHAN	L	staf	44.....
45	Adishya K. F	P	Jf. Penata KEB	45.....
46	Ahmad Taibit	L	staf	46.....
47	Shafa Atus Sholikhah	P	staf	47.....
48	Cetha Soria Afandi	P	staf	48.....
49	SITI RAHMATI	P	Staf	49.....
50	Eka Carya	P	Staf	50.....
51	Juanda Arianto	L	Kabid K 3	51.....
52	Jumaitini	P	Jf.	52.....
53	Khairun Fitri	P	staf	53.....
54	Mastuti	P	staf	54.....
55	Gusti Syarifah	P	staf	55.....
56	Habita Napsha P.	P	staf	56.....
57	Maya Auliat Andu	P	staf	57.....
58	Indra Fausi	L	staf	58.....

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	JABATAN	TANDA TANGAN
59	Rachmad Dedy F	L	Staf	59... <i>[Signature]</i> ...
60	M. Azpiani Rahman	L	Staf	60... <i>[Signature]</i> ...
61	Hidayatun Najah	P	Staf	61... <i>[Signature]</i> ...
62	Sechul	L	Staf	62... <i>[Signature]</i> ...
63	Muhammad Nuruddin	Laki-laki	Staf	63... <i>[Signature]</i> ...
64	Noor Latifah	P	Staf	64... <i>[Signature]</i> ...
65	Mayasari	P	Kasubag Perku	65... <i>[Signature]</i> ...
66	Umi Kulsum	P	Staf	66... <i>[Signature]</i> ...
67	Najmi Az-zahra	P	Staf	67... <i>[Signature]</i> ...
68	Henny Marlina	P	Staf	68... <i>[Signature]</i> ...
69	Meun B. Y	P	Staf	69... <i>[Signature]</i> ...
70	Agus An S	L	Kabid US	70... <i>[Signature]</i> ...
71	Yusita Apriana	L	Staf Penata KLB	71... <i>[Signature]</i> ...
72	Hj. Masitah Nurmi	P	Staf	72... <i>[Signature]</i> ...
73	Hj. Fauziah, S.Sos. M.AP	P	Kepala Dinas	73... <i>[Signature]</i> ...
74	Kastalani	L	Widyaf	74... <i>[Signature]</i> ...
75	Yayang Meilisha A	P	Staf	75... <i>[Signature]</i> ...

Rantau,
Pembuat daftar,
Kasubag Perencanaan dan Keuangan

Mayasari, SE., MM
NIP. 198205252010012023

Lampiran 4. Dokumentasi Kegiatan





